

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, dijabarkan tugas, pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

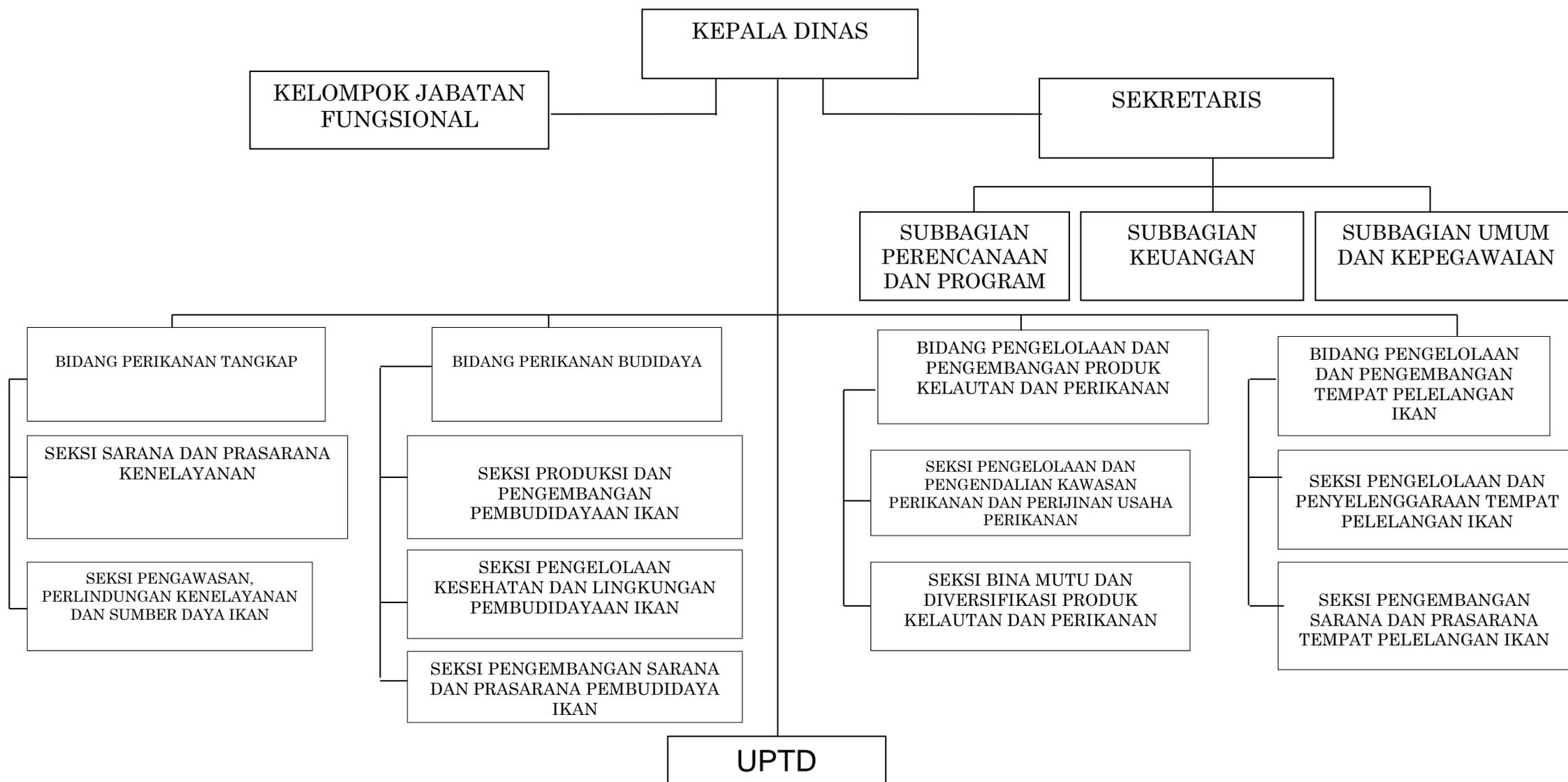
b. Fungsi

Dinas dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Untuk menunjang pencapaian tugas, pokok dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati ditopang oleh struktur/susunan organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.1 Bagan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati



Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbag Perencanaan dan Program;
 2. Subbag Keuangan;
 3. Subbag Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perikanan Tangkap
 1. Sarana dan Prasarana Kenelayanan;
 2. Seksi Pengawasan, Perlindungan Kenelayanan dan Sumber Daya Ikan;
- d. Bidang Perikanan Budidaya
 1. Seksi Produksi dan Pengembangan Pembudidayaan Ikan;
 2. Seksi Pengelolaan Kesehatan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan;
 3. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan;
- e. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan
 1. Seksi Pengelolaan Kawasan Perikanan dan Perizinan Usaha Perikanan;
 2. Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;
- f. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan
 1. Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
 2. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Tempat Pelelangan Ikan;
- g. Kelompok jabatan fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Berdasarkan Susunan Struktur Organisasi yang telah disebutkan sebelumnya masing-masing unsur dalam Organisasi mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan program bidang kelautan dan perikanan;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan;
- d. Pengawasan bidang Kelautan dan Perikanan;
- e. Perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pengendalian bidang kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perikanan;
- g. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan serta Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan;
- h. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas; dan
- i. Pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Sekretaris dalam menjalankan tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Sekretaris dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang perencanaan dan program;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang keuangan;

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang umum dan kepegawaian.

Sekretariat, membawahkan 3 (tiga) subbagian, yaitu subbagian Perencanaan dan Program; subbagian Keuangan; dan subbagian Umum Dan Kepegawaian.

C. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan Pengembangan Usaha dan Pemberdayaan Kenelayan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kenelayan Serta Pengawasan Perlindungan Kenelayan Pengendalian Sumber Daya Ikan.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Sarana dan Prasarana Kenelayan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Pengawasan, Perlindungan Kenelayan dan Sumber Daya Ikan;

Bidang Tangkap membawahi 2 (dua) seksi, yaitu Seksi Sarana dan Prasarana Kenelayan dan Seksi Pengawasan, Perlindungan Kenelayan dan Sumber Daya Ikan.

D. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, produksi dan usaha perikanan budidaya, pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya serta pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Produksi dan Pengembangan Pembudidaya Ikan;

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Pengelolaan Kesehatan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan.

Bidang Perikanan Budidaya membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu Seksi Produksi dan Pengembangan Pembudidaya Ikan, Seksi Pengelolaan Kesehatan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan, dan Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan;

E. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas Menyiapkan rumusan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Kawasan Perikanan, Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan serta Pengembangan dan Perizinan Usaha Perikanan.

Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Pengelolaan Kawasan Perikanan dan Perizinan Usaha Perikanan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan membawahi 2 (dua) seksi, yaitu Seksi Pengelolaan Kawasan Perikanan dan Perizinan Usaha Perikanan dan Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;

F. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas Menyiapkan rumusan kebijakan teknis bidang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan,

Pemasaran dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan serta Pengembangan Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan.

Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Pengembangan Sarana Prasarana Tempat Pelelangan Ikan;

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan membawahi 2 (dua) seksi, yaitu Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Tempat Pelelangan Ikan;

G. Kelompok jabatan fungsional

H. Unit Pelaksana Teknis Dinas

2.2. Sumber Daya Dinas Kelautan Dan Perikanan

Berdasarkan data bulan Desember tahun 2016, dalam melaksanakan kegiatan operasional Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pati didukung oleh sumber daya manusia sejumlah 62 personel, terdiri atas 44 orang laki-laki dan 18 perempuan. Secara rinci jumlah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut berikut :

Jumlah PNS : 62 orang, terdiri dari :

1. Pejabat Struktural : 19 orang
2. Fungsional Umum : 39 orang
3. Fungsional Khusus : 4 orang

Jumlah PNS menurut golongan

1. Golongan I : - orang
2. Golongan II : 23 orang
3. Golongan III : 31 orang
4. Golongan IV : 8 orang

Jumlah PNS menurut tingkat pendidikan

1. SD : 1 orang

2. SLTP : 0 orang
3. SLTA : 27 orang
4. Sarjana Muda : 2 orang
5. Sarjana : 22 orang
6. Pasca Sarjana : 10 orang

Jumlah Penyuluh Perikanan PNS (Pegawai Pusat) : 18 orang

Jumlah PPB (Penyuluh Perikanan Bantu) Tenaga Kontrak Pusat : 14 orang.

Jumlah tenaga kontrak dan harian lepas : 139 orang (123 orang tersebar di 8 TPI)

Selain sumber daya manusia sejumlah aset pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedinasan meliputi aset bergerak berupa kendaraan (roda empat dan roda dua), peralatan kantor (komputer, printer, LCD projector, lemari arsip, meja-kursi kantor, dll) dan aset tidak bergerak meliputi tanah, gedung perkantoran/bangunan. Deskripsi lengkap aset/modal fisik Dinas Kelautan sebagaimana tabel 2.1 dan tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.1
Aset Bergerak Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Nama Aset	Jumlah	Kondisi
1	Mobil dinas	9	Baik
2	Sepeda motor dinas	55	Baik
3	Traktor	4	Baik
4	Genset	4	Baik
5	Pompa Air	13	Baik
6	Excavator/ Bego	2	Baik
7	Kapal pemadam kebakaran	1	Baik
8	Alat2 laboratorium	33	Baik
9	Mesin ketik manual	4	Baik
10	Almari	79	Baik
11	Meja	215	Baik
12	Kursi	486	Baik
13	Filling kabinet	30	Baik
14	Tabung pemadam	7	Baik
15	Timbangan	12	Baik
16	Lemari es	4	Baik

No	Nama Aset	Jumlah	Kondisi
17	Freezer	1	Baik
18	Komputer/ PC	28	Baik
19	Laptop	51	Baik
20	Printer	55	Baik
21	AC	24	Baik
22	LCD proyektor	3	Baik
23	Kamera digital	5	Baik
24	Handycam	3	Baik
25	Wireless	3	Baik
26	Sound system	6	Baik
27	Televisi	4	Baik
28	Mesin finger print	1	Baik
29	Mesin potong rumput	2	Baik
30	Rak Arsip	8	Baik

Tabel 2.2.
Aset Tidak Bergerak Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Nama Tanah/ Bangunan	Luas Tanah (m²)	Luas Bangunan (m²)	Ket
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.479	817	
2	TPI Juwana Unit I	6.463	2.325	
3	TPI Juwana Unit II	40.000	3.680	
4	TPI Banyutowo	2.351	2.351	
5	TPI Puncel	420	214	
6	TPI Sambiroto	506	132	
7	TPI Margomulyo	271	84	
8	TPI Pecangaan	300	275	
9	TPI Alasdowo	120	72	
10	BBI Brati	14.180	639	
11	BBI Sukolilo	11.000	107,75	
12	BBI Tlogowungu	19.789	178	
13	Tambak Dinas Margomulyo	4.500	36	Bangunan gudang
14	Tambak Dinas Dororejo	4.100	81	Bangunan Handling splis

15	Laboratorium POSIKANDU	-	54	Berada di lahan tambak dinas Dororejo
-----------	---------------------------	---	----	---

Potensi Bidang Kelautan dan Perikanan

- Luas Wilayah Kawasan Pesisir : 37.943 Ha
- Jumlah Kecamatan Kawasan Pesisir : 7 kec.
- Jumlah Desa Kawasan Pesisir : 136 desa
- Panjang Pantai : 60 km
- Luas Tambak Garam : 2.838.111 Ha
- Produksi Garam Th. 2015 : 381.704 Ton
- Luas Potensi Mangrove : 8.906.352 Ha
- Luas Eksisting Mangrove : 173.2 Ha
- Terumbu Karang Buatan
 - Muara Sungai Juwana : 450 m²
 - Pantai Desa Lengkong : 450 m²
 - Muara Sungai Juwana : 450 m²
- Rumpon Pantai Banyutowo : 4.400 m²
- Kelompok Pembudidaya Garam
 - Jumlah Kelompok PUGAR : 976 kelompok
 - Jumlah Kecamatan : 4 kec.
 - Jumlah Desa : 20 desa
- Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) Berbadan Hukum : 130 KUB
 - KUB BH Kemenkumham : 5 KUB
 - KUB BH Notaris : 30 KUB
- Koperasi Nelayan Berbadan Hukum : 8

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan Dan Perikanan

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Kinerja pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dapat lebih terarah baik dari segi administratif dapat memenuhi

persyaratan yang dapat di pertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan yang di lakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan teknis serta penyusunan program dan kegiatan teknis dan strategis dalam pembangunan bidang kelautan dan perikanan
2. Memberikan pelayanan umum, baik berupa pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun kepada instansi vertikal atau horizontal.
3. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi bidang kelautan dan perikanan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, Provinsi, atau APBN

Berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati pencapaian target kinerja selama periode 2012 – 2017 dapat dijelaskan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2012-2017

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					(2013)	(2014)	(2015)	(2016)	(2017)	(2013)	(2014)	(2015)	(2016)	(2017)	(2013)	(2014)	(2015)	(2016)	(2017)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Produksi perikanan																		
	a. Perikanan tangkap (Ton)		44,637		41,239	42,063	42,904	43,762	44,637	28,954	16,143	26,710	27,782	26,734	0.70	0.38	0.62	0.63	0.60
	b. Perikanan budidaya (Ton)		43,350		37,035	42,200	42,250	42,300	43,350	34,060	28,597	39,195	42,036	42,510	0.92	0.68	0.93	0.99	0.98
2	Konsumsi ikan (kg/kapita/ tahun)		40		33.17	34.82	36.56	38.39	40.31	23.53	24.36	28.95	25.94	26.76	0.71	0.70	0.79	0.68	0.66
3	Cakupan bina kelompok nelayan (kelompok)		83		75	76	76	79	83	100	100	125	131	131	1.33	1.32	1.64	1.66	1.58
4	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan (kelompok)		110		110	110	110	110	110	276	276	373	373	375	2.51	2.51	3.39	3.39	3.41
5	Rata-rata pendapatan nelayan (ribuan rupiah/ bulan)		4,000		2,000	2,500	3,000	3,500	4,000	3,000	3,500	1,608	2,230	2,500	1.50	1.40	0.54	0.64	0.63
6	Rata-rata pendapatan pembudidaya ikan (ribuan rupiah/ bulan)		3,500		2,000	2,250	2,500	3,000	3,500	2,450	2,500	2,795	2,950	3,000	1.23	1.11	1.12	0.98	0.86

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
7	Jumlah usaha pengolahan ikan (unit)		74		60	63	66	70	74	614	792	778	693	775	10.23	12.57	11.79	9.90	10.47
8	Luas kawasan mangrove (ha)		221		151	166	183	201	221	NA	230	173	190	173	NA	NA	0.95	0.94	0.78
9	Luas abrasi yang tertangani (ha)		227		155	170	187	206	227	NA	230	42.38	39	54	NA	NA	0.23	0.19	0.24

Capaian kinerja selama kurun waktu 2012-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati tahun 2012-2017 berdasarkan target yang telah ditetapkan secara umum menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan walaupun sebagian besar belum melampaui dari target yang telah ditetapkan. Hal ini tidak terlepas dari kondisi pada tahun berkenaan, antara lain cuaca yaitu curah hujan dan gelombang laut yang mempengaruhi produksi perikanan baik itu perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Berdasarkan Tabel 2.3 dapat dilihat bahwa produksi perikanan tangkap cenderung menurun. Sektor Perikanan Laut sangat terpengaruh erat dengan berbagai perubahan kondisi alam yang kini terus menekan hasil tangkapan ikan di laut. Berbagai faktor seperti ketidakpastian cuaca, kondisi cuaca ekstrem (terutama di tahun 2014), kenaikan suhu permukaan laut (sea surface temperature-SST), naik turunnya harga bahan bakar serta perubahan arah angin, menurunkan tingkat produktivitas nelayan. Perubahan iklim juga turut memengaruhi distribusi dan penyebaran ikan di laut, sementara kenaikan harga bahan bakar akan memengaruhi kesempatan nelayan untuk menangkap ikan seiring dengan pergeseran penyebaran ikan yang terus berubah akibat perubahan iklim. Keluarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelarangan Penggunaan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, juga mengakibatkan sebagian besar nelayan di Kabupaten Pati tidak dapat melakukan kegiatan penangkapan karena sebagian besar nelayan di Kabupaten Pati masih menggunakan alat tangkap yang dilarang tersebut. Alat tangkap jenis ini yang banyak digunakan oleh Nelayan Kabupaten Pati adalah cantrang dan bundes. Produksi perikanan budidaya terutama produksi perikanan tambak dari tahun 2013 – 2017 mengalami kenaikan produksi sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan produksi disebabkan adanya bencana banjir yang melanda 7 kecamatan wilayah pesisir di Kabupaten Pati. Akibat adanya bencana banjir tersebut, para petambak mengalami gagal panen yang berdampak pada penurunan produksi tambak. Untuk luasan eksisting mangrove dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Namun demikian, di tahun 2017

luasan eksisting mangrove berkurang sebesar 8,75% menjadi 173,2 Ha. Penurunan luasan mangrove ini disebabkan oleh pengrusakan mangrove yang dilakukan masyarakat yang akan membuka lahan untuk dijadikan tambak dan juga oleh abrasi. Menurut data disebutkan kerusakan parah berada di 4 desa di Kecamatan Tayu yaitu Desa Kalikalong, Desa Sambiroto, Desa Keboromo, Desa Dororejo dan 3 Desa di Kecamatan Dukuhseti yaitu Desa Kembang, Desa Tegalombo dan Desa Puncel. Untuk mengatasi pengrusakan mangrove oleh masyarakat di Kabupaten Pati perlu dilakukan penegakan perda secara terus-menerus sehingga tidak ada lagi masyarakat yang melakukan pembukaan lahan di wilayah sabuk hijau.

Ada beberapa faktor internal penyebab ketidaktercapaian target kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati periode Tahun 2013-2017 antara lain adalah :

1. Keterbatasan SDM perangkat daerah baik kuantitas maupun kualitas.
2. Kualitas SDM pelaku usaha kelautan dan perikanan yang masih rendah.
3. Belum tersedianya sistem pembinaan dan pengawasan berbasis sistem informasi yang dapat mempermudah dan mempercepat pelayanan.
4. Masih lemahnya koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka untuk sinergitas pelaksanaan kebijakan bidang kelautan dan perikanan.
5. Belum efektifnya perencanaan program dan kegiatan khususnya dalam menentukan indikator kinerja yang dapat menunjukkan fokus dan lokus (sasaran) secara lebih tepat.
6. Jumlah anggaran tiap tahun yang belum sebanding dengan beban tugas yang diemban oleh perangkat daerah.

Berikut Tabel 2.4 dan Tabel 2.5 secara lengkap yang menggambarkan perkembangan jumlah anggaran dan realisasi APBD Kabupaten Pati Tahun 2013-2017 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

Tabel 2.4**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati**

No	Uraian (Program)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
		1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	152,000	214,000	175,500	236,000	193,000	50,000	51,000	60,000	74,210	25,000
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	145,000	159,000	189,000	198,000	235,000	150,000	145,000	402,500	296,715	55,000
3	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	-	50,000	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-

No	Uraian (Program)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
		1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut	-	500,000	-	700,000	-	-	-	-	-	-
5	Pengembangan Budidaya Perikanan	288,000	8,012,000	9,480,250	10,803,000	12,464,000	192,650	435,377	32,034,435	1,026,140	867,000
6	Pengembangan Perikanan Tangkap	19,974,000	19,985,000	23,527,500	29,095,000	34,325,000	5,179,023	2,732,500	3,736,000	1,042,695	7,430,020
7	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	118,000	80,000	85,000	30,000	30,000	33,158	121,400	20,000	37,840	15,000
8	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	2,485,000	4,020,000	4,930,000	5,690,500	3,765,000	2,318,070	3,900,799	78,240,271	3,358,400	2,605,098
9	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	1,505,000	1,755,000	2,292,500	1,800,000	1,932,500	481,546	637,000	438,000	671,320	1,572,154

Tabel 2.5

Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati

No.	Uraian (Program)	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	40.79	-17.99	34.47	-18.22	2.00	17.65	23.68	-66.31	6.15	-15.91
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	9.66	18.87	4.76	18.69	-3.33	177.59	-26.28	-81.46	12.83	-22.18
3	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	0	0.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut	0.00	-100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Pengembangan Budidaya Perikanan	2681.94	18.33	13.95	15.38	125.99	7257.86	-96.80	-15.51	156.49	45.65

No.	Uraian (Program)	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Pengembangan Perikanan Tangkap	0.06	17.73	23.66	17.98	-47.24	36.72	-72.09	612.58	14.49	9.44
7	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	-32.20	6.25	-64.71	0.00	266.13	-83.53	89.20	-60.36	-28.99	-17.99
8	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	61.77	22.64	15.43	-33.84	68.28	1905.75	-95.71	-22.43	10.95	2.96
9	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	16.61	30.63	-21.48	7.36	32.28	-31.24	53.27	134.19	6.45	34.42

Dari tabel 2.4 dan tabel 2.5 tampak ada 2 (dua) program yang tidak bisa terlaksana sama sekali dari tahun awal renstra hingga akhir tahun pelaksanaan Renstra. Program tersebut adalah Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut dan Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut. Dari tabel tersebut pula dapat terlihat bahwa pada 2017 pertumbuhan realisasi anggaran mengalami penurunan untuk beberapa program. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati antara lain:

1. Keterbatasan APBD sehingga lebih diutamakan program yang prioritas
2. Adanya hajatan politik di tahun 2017 sehingga ada pembatasan anggaran.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan tugas dan fungsi utamanya kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD. Berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

1. Tantangan

Dari telaah Rencana Jangka Menengah Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tantangannya adalah:

- a) Meningkatnya produksi sektor kelautan dan perikanan;
- b) Terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan;
- c) Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana penunjang UPTD Balai Benih dan Budidaya Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati;
- d) Meningkatnya konsumsi makan ikan masyarakat Kabupaten Pati;

- e) Terwujudnya pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif;
- f) Terwujudnya Sumberdaya Manusia (SDM) Dinas Kelautan dan Perikanan yang Kompeten, Profesional, dan Berkepribadian;
- g) Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal, dan mudah diakses;
- h) Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan;
- i) Terlaksananya pengujian mutu, pengawasan pengolahan hasil perikanan.

2. Peluang

Beberapa peluang yang dapat diambil dalam upaya pengembangan sektor Kelautan dan Perikanan antara lain :

- a. Ditetapkannya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati sebagai salah satu Dinas unggulan pembangunan lima tahun ke depan oleh Pemerintah Kabupaten Pati;
- b. Adanya kebijakan Pemerintah (Permen KP No. 71) yang melarang penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan;
- c. Adanya undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang melindungi kelestarian mangrove;
- d. Adanya unit-unit pendukung pelaksanaan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari 8 TPI, 2 Tambak Dinas, 2 Laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan dan 3 Balai Benih Ikan;
- e. Pembangunan Gudang Garam Kabupaten Pati yang berlokasi di Desa Raci Kecamatan Batangan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan;
- f. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat;
- g. Globalisasi perdagangan baik dalam skala regional maupun internasional;
- h. Meningkatnya peran masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Berdasarkan analisis di atas, secara garis besar jenis layanan yang diselenggarakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2017-2022 yaitu:

1. Pembinaan dan pelatihan ketrampilan masyarakat kelautan dan perikanan;
2. Pendampingan dan fasilitasi usaha bidang kelautan dan perikanan;
3. Peningkatan kualitas kelembagaan kelompok-kelompok kelautan dan perikanan;
4. Sosialisasi regulasi tentang kelautan dan perikanan;
5. Pengelolaan sarana dan prasarana pendukung usaha bidang kelautan dan perikanan;
6. Peningkatan kualitas pelayanan jasa unit pelaksana tugas Dinas Kelautan dan Perikanan baik itu Tempat Pelelangan Ikan maupun Balai Benih dan Budidaya Ikan Kabupaten Pati;
7. Pemberian rekomendasi ijin usaha bidang kelautan dan perikanan;
8. Kerjasama lintas sektor pelaksanaan patroli dalam rangka pengamanan sumberdaya kelautan.

Untuk mendukung jenis layanan yang diselenggarakan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kurun waktu tahun 2017-2022, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan untuk tahun pertama sebesar Rp 7.370.115.000,00, tahun ke 2 Rp. 25.350.178,00, tahun ke 3 Rp. 32.257.405.000, tahun ke 4 Rp. 35.355.313.000,00, tahun ke 5 Rp. 38.332.793,00 sehingga dalam kurun waktu lima tahun dana yang dibutuhkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebesar Rp. 138.665.804.000,00 dengan Alokasi pendanaan 9,52% untuk program dan kegiatan administrasi perkantoran (EKS BAU), 88,10% untuk program dan kegiatan prioritas dan sisanya sebesar 2,38% untuk program dan kegiatan lainnya.